

# **KOLABORASI *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

## ***STAKEHOLDERS COLLABORATION IN HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN KAMPAR DISTRICT KAMPAR***

**Maya Dayana**

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

[mavadavana25@gmail.com](mailto:mavadavana25@gmail.com)

**Abstrak:** Kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan suatu kerjasama melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. keadaan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kampar belum optimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan, sungai, dan jembatan hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kerjasama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif dan data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi *Stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum optimal, hal ini karena beberapa faktor-faktor penghambat seperti belum adanya program kerja dan rendahnya kesadaran untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

**Katakunci :** *Kolaborasi, Stakeholders, Pengelolaan Sampah*

**Abstract:** *Stakeholders collaboration in household waste management in addressing the problems of household waste management in Kampar District Kampar Regency. the situation in the field shows that there are many piles of garbage on the roadsides, rivers, and bridges in Kampar district, this is because there is still a lack of public awareness in the management of waste. This study aims to find out and analyze stakeholders collaboration in the management of household waste in Kampar District Kampar Regency, and to find out the factors that inhibit stakeholders collaboration in the management of household waste in Kampar District Kampar Regency. This research uses purposive sampling technique with qualitative research type with descriptive case study approach and required data both primary and secondary data obtained through observation, interview and documentation and then analyzed based on research problems. The results showed stakeholders collaboration in the management of household waste in Kampar District Kampar regency has not been optimal, this is because several factors such as the establishment of communication between stakeholders, the absence of forums in collaboration and low awareness to collaborate in waste management in Kampar District Kampar Regency.*

**Keywords:** *Collaboration, Stakeholders, Waste Management*

## **PENDAHULUAN**

Selama masih ada kehidupan, maka manusia tidak dapat terpisahkan oleh sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Produksi sampah akan terus ada, sehingga bila tidak

dikelola akan terjadi penumpukan volume sampah yang justru menyebabkan permasalahan baru Di masa pandemik saat ini, isu lingkungan menjadi topik utama pembahasan, dimana sampah juga merupakan bagian komponen dari

sebuah ekosistem yang harus dikelola secara kreatif dan inovatif (Rahmi, 2020).

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar meningkat setiap tahun, Kenyataan besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat dari pendatang dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan hidup. Selain itu, Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat menjadikan Kabupaten Kampar sebagai daerah yang menawarkan berbagai fasilitas, seperti lapangan pekerjaan, perkebunan dan sebagainya. Keadaan tersebut pada satu sisi telah mendatangkan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, namun pada sisi lain juga dapat menimbulkan persoalan seperti gangguan sosial dan lingkungan yang kurang nyaman dan

tidak sehat bagi masyarakat. Pengelolaan sampah sampai saat ini masih merupakan momok terutama bagi kota-kota besar. Masalah yang umum dijumpai adalah berkaitan dengan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berakibat pada ketidakpuasan dengan penduduk sekitar. (Sufianti, 2011).

Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu lingkungan dikatakan kurang sehat dan tidak bersih, salah satunya adalah permasalahan sampah. Kabupaten Kampar tidak terlepas dari yang namanya masalah sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Kampar memerlukan penyelesaian segera karena volume sampah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat di lihat berdasarkan tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.** Sumber, komposisi , dan volume sampah di Kabupaten Kampar Tahun 2017, 2018 dan 2019

| No.           | Sumber           | Komposisi   | Tahun 2017            |                                  | Tahun 2018            |                                  | Tahun 2019            |                                  |
|---------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|               |                  |             | Volume (Ton/pertahun) | Persentase sampah yang terkelola | Volume (Ton/pertahun) | Persentase sampah yang terkelola | Volume (Ton/pertahun) | Persentase sampah yang terkelola |
| 1.            | Perumahan        | 60%         | 72616.548             | 14%                              | 74068.866             | 18%                              | 75550.243             | 21%                              |
| 2.            | Pasar            | 10%         | 12102.758             | 19%                              | 12344.811             | 23%                              | 12591.707             | 30%                              |
| 3.            | Perniagaan       | 10%         | 12102.758             | 3%                               | 12344.811             | 15%                              | 12591.707             | 15%                              |
| 4.            | Perkantoran      | 8%          | 968.206               | 5%                               | 9875.849              | 17%                              | 10073.366             | 16%                              |
| 5.            | Fasilitas Publik | 5%          | 6051.379              | 8%                               | 6172.406              | 10%                              | 6295.854              | 11%                              |
| 6.            | Kawasan          | 5%          | 6051.379              | 1%                               | 6172.406              | 11%                              | 6295.854              | 11%                              |
| 7.            | Objek wisata     | 2%          | 2420.552              | 4%                               | 2468.962              | 11%                              | 2518.341              | 12%                              |
| <b>Totall</b> |                  | <b>100%</b> | <b>121.027,58</b>     | <b>11%</b>                       | <b>123.448,11</b>     | <b>17%</b>                       | <b>125.917,07</b>     | <b>20%</b>                       |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar,2020.*

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa sumber sampah di fasilitas publik, kawasan, dan sampah objek wisata. Data di atas menunjukkan bahwa secara faktual telah terjadi peningkatan jumlah volume sampah dari

Kabupaten Kampar ada 7 macam yaitu sampah perumahan, pasar, perkantoran, tahun 2017 sampai tahun 2019. Selain itu persentase pengelolaan sampah juga mengalami peningkatan namun hanya 3% sampai 6% saja dalam

pertahun. Persentase pengelolaan sampah yang paling tinggi adalah sampah pasar yang berkomposisi sebesar 10% namun

persentase pengelolannya bisa mencapai kenaikan rata-rata 4% sampai 7% pertahun. Sedangkan sampah perumahan yang memiliki komposisi sampah paling banyak sebesar 60% namun persentase pengelolannya hanya mengalami peningkatan rata-rata 4 % saja dari tahun ke tahun, dan tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk setiap tahunnya, maka dari itu permasalahan sampah yang terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu dari sumber sampah yang paling banyak yaitu sampah yang bersumber dari perumahan atau sampah rumah tangga.

Sampah menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh daerah, baik itu di kota besar maupun di kota kecil (Harmana dkk, 2021). Sampah adalah salah satu permasalahan penting dari perkembangan suatu kota. Hal ini adalah implikasi dari berkembangnya aktivitas ekonomi yang menghasilkan berbagai barang yang tidak dipakai. Secara sosial, sampah diindikasikan sebagai masalah publik dapat ditunjukkan bagaimana publik merespon permasalahan ini (Sayrani dkk, 2020).

Secara umum sampah baik kualitas maupun kuantitas sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dari taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas sampah antara lain yaitu :

1. Jumlah penduduk, dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk disuatu daerah, maka semakin banyak pula sampah yang diproduksi. Pengelolaan sampah ini berpacu dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk
2. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka semakin banyak pula perkapita sampah yang dihasilkan.
3. Kemajuan teknologi, kemajuan teknologi akan menambah jumlah

ataupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang sangat beragam.

Kecamatan Kampar merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.206 jiwa. Kecamatan Kampar mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi yang ada di Kabupaten Kampar, kepadatan penduduk akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat, hal tersebut akan berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Selain itu, Keadaan sosial ekonomi dan kemajuan tekonogi di Kecamatan Kampar cukup maju karena Kecamatan Kampar berbatasan langsung dengan ibu Kota Kabupaten Kampar dan termasuk salah satu Kecamatan yang menjadi akses jalan raya antar Provinsi. keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Kampar sebagai daerah yang banyak menghasilkan sampah, seperti yang ada di beberapa desa yang berada di Kecamatan Kampar banyak di temukan tumpukan- tumpukan sampah di pinggir jalan raya di yang di buang oleh masyarakat sehingga menyebabkan pencemaran pada lingkungan.

Berikut ini merupakan gambar dari beberapa lokasi tumpukan sampah yang ada di Kecamatan Kampar, sebagai berikut :



*Sumber: Olahan Peneliti*

**Gambar 1.** Tumpukan Sampah di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang di Kecamatan Kampar

Gambar 1. menunjukkan bahwa kondisi tumpukan-tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di beberapa desa seperti desa Rumbio, Penyasawan, Air Tiris, dan Batu Belah, yang terdapat di kecamatan Kampar. Sampah diatas merupakan sampah yang di dominasi oleh sampah perumahan atau sampah rumah tangga.

Dibeberapa lokasi penumpukan sampah sudah ada larangan dalam bentuk spanduk agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, namun banyak masyarakat yang tidak menghiraukannya dan masih membuang sampah di pinggir jalan raya.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan kegiatan pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat

prasarana dalam pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang di timbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang mana mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan beberapa muatan pokok penting yang diamanatkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- b. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat.
- c. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah yang menggantikan paradigm lama yaitu kumpul-angkut-buang.

Dalam Peraturan Pemerintah diatas tentang pengelolaan sampah, bahwa salah satu landasan pokok dalam pengelolaan sampah adalah adanya pembagian tugas dan peran seluruh pihak dalam pengelolaan sampah, dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah :

1. Pemerintah (kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota)
2. Pihak non pemerintah (dunia usaha/ lembaga privat, dan pengelola kawasan)
3. Masyarakat.

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada peran dan tugas dari pemerintah, nonpemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah di daerahnya, yang mana pada saat ini menjadi sangat penting guna mereduksi jumlah sampah yang dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan.

Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama yang melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah pada pasal 23 tentang kemitraan, sebagai berikut ini :

1. pemerintah daerah secara sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
2. kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan
3. tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar di atas menyebutkan bahwa mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan badan usaha ataupun pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah. yang mana masing-masing pihak memiliki tugas dan peran dalam pengelolaan sampah, sebagaimana yang di sebutkan dalam Peraturan Dearah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terdiri dari :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
- e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat serta mengurangi dan menangani sampah.
- f. melakukan koordinasi antar Dinas /Badan terkait, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan peran dan tugas dari pihak nonpemerintah atau swasta dalam pengelolaan sampah antara lain yaitu :

- a. diperlukan peran serta swasta dalam pengelolaan sampah (pengumpulan/pengangkutan, daur ulang, *incinerator*, *landfill*, dan lainnya) yang dilakukan dengan profesional, transparan dan *accountable*.
- b. Diperlukan perangkat kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh swasta seperti kemudahan dalam memenuhi ketentuan dan adanya insentif yang menarik dari pemerintah terhadap swasta yang melakukan bisnis pengelolaan sampah.

Selanjutnya peran dari masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 23 Tahun 2009 pada pasal 24 tentang peran masyarakat, yang dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan.
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, dan pemeliharaan pengelolaan sampah.
- c. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- e. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan tentang peran serta tugas dari pemerintah, nonpemerintah dan masyarakat atau para *stakeholders* dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang

menjadi kepentingan dan tanggung jawab bersama, yang harus diselesaikan dengan cara bersama juga. Dalam pengelolaan sampah para *stakeholders* sangat mempunyai peranan penting untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga. selain itu, kolaborasi *stakeholders* yang mempunyai makna sebagai suatu proses kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam memecahkan suatu masalah yang melibatkan penyatuan sudut pandang yang berbeda diantara berbagai pihak yang terlibat sehingga mampu menghasilkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam melakukan kolaborasi pengelolaan sampah rumah tangga peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah. Saat ini di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas dalam pembuangan sampah, belum sampai pada tahap pengelolaan sampah yang memberikan manfaat kembali bagi masyarakat, banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana mengelola sampah dengan baik, hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang baik dan benar. Oleh karena itu dibutuhkan unsur kerjasama yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Adapun bentuk kolaborasi *stakeholders* yang diharapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah kolaborasi dalam melakukan sosialisasi, pertukaran informasi, penyediaan fasilitas untuk masyarakat dalam mengolah sampah, dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. karena selama ini bentuk kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan di Kabupaten Kampar belum ada yang berupa suatu program kerja yang terstruktur yang melibatkan para *stakeholders* secara langsung dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga yang

ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Penelitian ini penting untuk diteliti karena pertama di Kecamatan Kampar saat ini banyak terdapat tumpukan-tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan, jembatan dan sungai, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik untuk menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya hal khusus yang membuat pengelolaan sampah ini tertarik untuk diteliti adalah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun juga diperlukan peran dari pihak swasta dan masyarakat, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah pada pasal 23 tentang kemitraan, yang menyebutkan bahwa didalam pengelolaan sampah itu harus ada kerjasama antara pihak pemerintah, badan usaha atau pihak swasta dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar mempermudah dan mempercepat dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Karena permasalahan sampah merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan dengan cara bersama juga, dan jika sampah di kelola dengan baik maka akan dapat menghasilkan nilai ekonomis dan juga dapat menjadikan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Kolaborasi merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi atau pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin atau sulit dicapai apabila dilakukan secara individual atau mandiri. Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh, (2012:13) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pegangan dalam melakukan kolaborasi yaitu :

1. Motivasi Bersama (*Shared Motivation*), menekankan pada elemen interpersonal dan realisional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut dengan modal sosial, atau dorongan dari masing-masing pihak untuk mau berkolaborasi atau kerjasama, selain itu komponen ini di inisiasi oleh

penggerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah.

2. Kepercayaan Bersama (*Mutual Trust*), kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada saat akan melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan dalam melakukan suatu kerjasama.
3. Pemahaman Bersama (*Mutual Understanding*), yaitu lebih kearah pemahaman bersama untuk membuat sesama pihak yang terlibat agar saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan masing-masing pihak yang tidak sependapat, atau sepemahaman, pembentukan pemahaman bersama
4. Legitimasi Internal (*Legitimation Internal*), yaitu pengakuan yang berasal dari internal atau pihak yang terlibat untuk berkolaborasi. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya dan kredibel terhadap kepentingan bersama.
5. Komitmen (*Commitment*), Adanya komitmen pada proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah mampu menghilangkan penghambat yang sering kali muncul karena perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi antar organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi dapat dilihat dari tujuan masing-masing bergabung di dalam kolaborasi.

Menurut Sabaruddin (2015:25) mengemukakan bahwa kolaborasi adalah kerja sama antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara individual. Adapun istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna serta tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut pada istilah tersebut.

Pengertian kolaborasi menurut Wijaya (2015) mengatakan bahwa

kolaborasi dapat dibedakan kedalam dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normative. Kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur atau mengelola secara institusional, artinya sejumlah institusi pemerintah maupun nonpemerintah ikut melibatkan sesuai seiring dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi. dengan porsi kepentingan dan tujuannya biasanya terdiri dari institusi pemerintah saja, lembaga kemasyarakatan saja. Sedangkan kolaborasi dalam artian normaif merupakan asprsi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para aktor atau mitranya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Alasan peneliti untuk memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penelitian ini adalah agar dapat menggambarkan permasalahan yang ada dilapangan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa upaya penting dalam pengumpulan data seperti pengajuan pertanyaan dalam bentuk wawancara mengenai bagaimana kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam melakukan kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pengumpulan data yang telah didapatkan secara spesifik dari informan, melakukan analisis data yang telah didapatkan dan mengategorikan

sesuai panduan wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang telah diperoleh pada saat observasi, wawancara dan survei. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, *soft copy*, rekaman ataupun catatan pada saat penelitian, kemudian dikumpulkan untuk disatukan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Hasil pengumpulan data wawancara dan survei yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan pedoman penggalan data yang menjadi instrument dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu.

Kemudian data tersebut disiapkan untuk dibaca dan dipahami agar penulis mudah untuk melakukan analisis deskripsi data, kemudian hasil wawancara diidentifikasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang sudah ditetapkan menjadi informan dalam penelitian. Hasil pengelompokan yang dilakukan akan menjadi bahan penelitian untuk mempersiapkan data yang akan dianalisis.

Pengelompokan data dan mentranskrip data yang telah diperoleh akan dibaca berulang kali agar data tersebut dapat dianalisis dan dimaknai. Proses pembacaan yang berulang dilakukan terhadap hasil wawancara, observasi dan survei agar dapat memahami secara detail dan mendalam akan data yang didapatkan sehingga hasil observasi, wawancara dan survei tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah kesatuan sebelum dipecah menjadi beberapa bagian.

Klasifikasi data dilakukan dengan menyederhanakan data yang ada dan mengelompokkan data kedalam konsep-konsep kunci (kategorisasi data). Hal tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data transkrip yang telah dikategorikan kemudian informasi yang diperoleh disaring untuk dapat dijadikan *data base* dalam melakukan analisis. Proses klasifikasi data dilakukan dengan cara manual kemudian akan dibuatkan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah dikategorikan (penyimpulan sementara). Setelah itu dilakukan *check* dan *re-check*

antara satu sumber dengan sumber lainnya, serta proses triangulasi sumber data.

Untuk mengidentifikasi kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar melalui wawancara peneliti dengan beberapa narasumber dan observasi di lapangan, selanjutnya data dan informasi yang diperoleh lalu dianalisis secara mendalam dan berkali-kali, kemudian membaginya menjadi data yang akan di klasifikasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*

#### **1. Motivasi Bersama (Shared Motivation)**

Motivasi bersama dalam kolaborasi pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi itu sudah ada, diantaranya untuk memberikan pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, dari pihak swasta yaitu agar lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku untuk dikelola, dari pihak bank sampah yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan fasilitas dalam pengelolaan sampah. sedangkan dari pihak pemerintah yaitu untuk memudahkan kerjasama dalam pengelolaan sampah dan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar mau mengelola sampah, terutama sampah rumah tangga. karena permasalahan sampah merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan dengan cara bersama juga, oleh karena itu dibutuhkan dorongan atau motivasi bersama yang harus terus ditingkatkan dan dikuatkan dalam sebuah kolaborasi dengan menyamakan persepsi, visi, misi dan tujuan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga.

#### **2. Kepercayaan Bersama (Mutual Trust)**

Kepercayaan bersama dalam

kolaborasi *stakeholders* pengelolaan sampah rumah tangga itu penting karena tanpa adanya kepercayaan bersama dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat, maka kerjasama atau kolaborasi akan sulit untuk dijalankan. Kepercayaan bersama dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kampar itu sudah ada dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah rumah tangga.

#### **3. Pemahaman Bersama (Mutual Understanding)**

Pemahamanbersamadalam kolaborasi pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar itu sudah ada dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi, sudah memahami akan tugas dan tujuannya masing-masing dalam berkolaborasi. Namun yang menjadi kendalanya ada pada masyarakatnya masih banyak yang kurang memahami dengan adanya kerjasama dalam pengelolaan sampah. oleh karena itu dibutuhkan edukasi dan sosialisasi untuk membentuk kerjasama atau kolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal tersebut dilakukan dan harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari dan memahami akan pentingnya pengelolaan sampah dan agar mereka dapat mengimplementasikan pemahamannya pada kehidupan sehari-hari

#### **4. Legitimasi Internal (Internal Legitimasi)**

Legitinternal atau pengakuan yang berasal dari internal *stakeholders* untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dapat di simpulkan bahwa masing-masing *stakeholders* menerima dengan adanya kolaborasi atau kerjasama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

#### **5. Komitmen (Commitment) Keterlibatan dan komitmen yang**

kuat dari para pihak yang terlibat mulai dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melakukan kolaborasi sangat diperlukan. Kekuatan proses kolaborasi sangat di tentukan oleh komitmen yang ada dalam pihak yang berkolaborasi, karena komitmen yang kuat akan sangat menentukan

sukses atau tidaknya kolaborasi tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

### ***Faktor-faktor Penghambat Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar***

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat terjadinya kolaborasi *stakeholders* dalam berkolaborasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga, Padahal kesadaran merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam membentuk sebuah kolaborasi atau kerjasama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga. terbentuknya kolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, namun saat ini di Kecamatan Kampar belum ada program kerja khusus tentang kerjasama atau kolaborasi yang melibatkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut bekerjasama atau pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas mengenai Kolaborasi *Stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar maka peneliti menarik kesimpulan yaitu setelah masing- masing indikator dijelaskan maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi *Stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar saat ini belum optimal, Hal tersebut karena secara kebijakan atau aturan sudah ada yang namanya kerjasama dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang terdapat pada Peraturan Daerah Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah pada pasal 23 tentang kemitraan yang mana didalamnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau badan usaha

dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun secara implementasinya belum dilakukan secara keseluruhan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, karena selama ini kerjasama hanya dilakukan antara pemerintah dan masyarakat saja melalui bank sampah, dan antara bank sampah dengan pihak swasta, namun secara keseluruhan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat itu belum ada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat dalam kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yaitu belum adanya program kerja khusus yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Emerson , Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh.(2012). *Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Administration Research and theory, Vol.22 no. 1, hal, 1-29.
- Harmana, D., Wargadinata, E. L., & Nurdin, I. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 247-260.
- Rahmi, V. A., Ismanto, H., & Fathoni, M. Z. (2020). Inovatif Saat Pandemi Covid Melalui Pelatihan Kewirausahaan Khusus Perempuan Berbahan Sampah “Kolaborasi BUMDes dan Warga”. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 418-425.
- Rahmi, V. A., Ismanto, H., & Fathoni, M. Z. (2020). Inovatif Saat Pandemi Covid Melalui Pelatihan Kewirausahaan Khusus Perempuan Berbahan Sampah “Kolaborasi BUMDes dan Warga”. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 418-425.

- Sayrani, L. P., & Tamunu, L. M. (2020). Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik: Studi Isu Sampah di Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*, 2(1), 1-13.
- Sabaruddin, Abdul, (2015), *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*,  
*Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 8(3), 07.
- Wijaya, D.C, (2015). Kolaborasi Antar *Stakeholders* dalam Pelaksanaan Program Kartu Insentif Kota Surakarta
- Teori, Konsep dan Aplikasi*.  
Yogyakarta Graha Ilmu
- Sufianti,E.(2011).Perencanaan Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan Yang Berkelanjutan.